

## ► KESEHATAN MASYARAKAT

## Pemerintah Dinilai Masih Cuek Sikapi Bahaya Rokok

JOGJA—Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI) menilai pemerintah kurang peduli terhadap dampak rokok dan terkesan masih memihak kepentingan perusahaan. Akibatnya, tingkat konsumsi rokok di Indonesia masih terbilang tinggi.

Ketua PKEKK UI, Hasbullah Thabrany, mengatakan pemerintah terlihat masih khawatir dampak pengendalian produksi tembakau memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

"Pemerintah masih takut jika produksi rokok dibatasi atau malah ditekan petani tembakau akan rugi. Harusnya bukan itu, tapi pajak bea cukai rokok yang 10 persen untuk negara sebagian bisa dikembalikan ke petani untuk usaha produksi lain selain tembakau atau rokok," ujar dia saat menjadi *Keynote Speech* dalam *International Conference Promoting Tobacco Control Through Policy-Relevant Research* di selenggarakan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta, Senin (20/4).

Seminar yang digelar bekerja sama dengan Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (JHSPH) dan The National Cancer Institute of The United States National Institute of Health (NCI/NIH) akan berlangsung sejak Minggu (19/4). Hasbullah Thabrany menilai pemerintah untuk lebih memerhatikan faktor kesehatan masyarakat yang ditimbulkan dampak dari asap rokok. Kesadaran masyarakat Indonesia akan bahaya rokok masih rendah.

### Harga Rokok

Ia menilai tingginya konsumsi rokok di Indonesia juga erat terkait dengan harga rokok yang jauh lebih murah dibanding beberapa negara lain seperti Malaysia.

Ia membeberkan di Indonesia tingkat konsumsi rokok setiap tahun mencapai 260 miliar batang.

"Yang cukup mengejutkan konsumen aktif rokok ini warga usia produktif," imbuh dia. Dalam kesempatan itu, narasumber dari American Cancer Society (ACS), Jeffrey Drope, banyak negara tidak hanya Indonesia yang memiliki persoalan pengendalian tembakau. Ia memaparkan penelitian ACS di Malawi, menunjukkan kondisi ekonomi malah lebih parah. Masyarakat sangat bergantung dengan pertanian dari sektor tembakau.

Menyikapi persoalan dampak tembakau ini, narasumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, Tjandra Yoga Adiatama, mengatakan pemerintah sudah berupaya mengendalikan peredaran tembakau. Tjandra menyatakan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai fasilitas publik salah satu keseriusan pemerintah mempersempit dampak tembakau. Menurut dia, upaya preventif sudah dilakukan dengan cara konseling untuk membangun motivasi konsumen berhenti merokok hingga tingkat puskesmas.

Ketua penyelenggara kegiatan, Nanik Prasetyoningsih, mengakui upaya kalangan akademisi untuk mendorong pemerintah menanggulangi pengendalian konsumsi tembakau. (Endro Guntoro/JIBI)